

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. (2017). Pelajaran Hukum Pidana II. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, & Zainal asikin. (2012). , pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada .
- C.S.T. Kansil, & Christine S.T Kansil. (2014). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita.
- Gialdah Tapiansari Batubara, & Tien S. Hulukakti. (2020a). Dasar-dasar Hukum Pidana (1st ed.). Setara press.
- Gialdah Tapiansari Batubara, & Tien S. Hulukakti. (2020b). Dasar-dasar Hukum Pidana (1st ed.). Setara press.
- Mahrus Ali. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafik.
- Mahrus Ali. (2019). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.
- Maman Budiman. (2020a). Kejahatan Korporasi Di Indonesia/Penyusunan (2nd ed.). Setara Press.
- Maman Budiman. (2020b). Kejahatan Korporasi Di Indonesia/Penyusunan (1st ed., Vol. 1). Setara Press.
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. (2014). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru.
- Roeslan Saleh. (2011). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Centra.
- Soerjono Soekanto. (2013). Kriminologi Suatu Pengantar . Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2013). Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada.
- sUDARTO. (12 C.E.). Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto.
- Surachmin, Cahaya, & Suhandi. (2013). Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencega. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2015). Buku Pintar Perseroan Terbatas (1st ed.). Raih Asa Sukses.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wargabinaan Pemasarakatan. (N.D.).

Persetujuan Bersama, D., Ketentuan, B. I., & Pasal, U. (N.D.). Undang-Undang Republik Indonesianomor 22 Tahun 2022 tentangpemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (N.D.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (N.D.).

Sema Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

C. JURNAL

Alfiana Dwi Putri Maesty¹, & Hari Soeskandi. (22 C.E.). PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI . *Bureaucracy Journal* , 2, 82.

Basri. (2017). Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. *Jurnal Varia Justicia*, , 13(2), 82–92.

Doddy Syukma R, Abdul Bari Azed, & Bunyamin Alamsyah. (2022). Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 341–342.

Heru Prabowo Adi Sastro, Marlina, Triono Eddy, & Aulia Rosa Nasution. (2020). Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai Legal Analysis of Provision of Remission of Prisoners in Class II A Binjai Penitentiary. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2).

Ibrahim, Johannes, Sirait, & Yohanes Hermanto. (2015). Konsepsi “Law as a Tool of Social Engineering” sebagai Upaya Manajemen Hukum dalam Menciptakan Kepastian Hukum. *Published Version*.

Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan . *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 1(No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)).

- Nixson Syafruddin, Kalo Tan Kamello, & Mahmud Mulyadi. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal* 2 (2).
- Novita. (2019). PELAKSANAAN REMISI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Novita PELAKSANAAN REMISI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI . *Morality : Jurnal Ilmu Hukum Juni 2019*, 5(1–14).
- Nugraheni, H. (2017). *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi* (1st ed.). Politeknik Kemenkes.
- Rika Ekayanti. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udanaya* 4 (1), 138.
- River Yohanes Manalu. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crime* 4 (1).
- Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, & Zaenal Arifin. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review* 3 (1), 102.
- Rohrohmana, B. (2017). Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yuridika*, 32(2), 210.
- Romli Atmasasmita. (2002). *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*,. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Romli Atmasasmita. (2013). *Hak Narapidana sana dengan Hak Asasi Manusia*. SINDO.
- Rusli Muhammad. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22 (2).
- Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyung Law Journal*, 1(2), 159–179.
- Thalib, Hambali, Ramadhan, Ahmad, Djanggih, & Hardianto. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71.
- Warih Anjari. (2022). PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Komisyudisia*, 15(2), 267.
- Widyastuti, & Anastasia R. (2015). Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi. *Yustisia Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 683.

D. SUMBER LAIN

kompas.com. (2022). *Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022#:~:text=Kasus%20korupsi%20di%20Indonesia%202022&text=Dilansir%20dari%20laman%20resmi%20KPK,dan%20mengeksekusi%20putusan%2051%20perkara>.